

ABSTRAK

“KARTEL DALAM PERSAINGAN USAHA BIDANG PENERBANGAN MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1999” (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.613.K/PDT.Sus/2011)

**FAUZI ABDULLAH
15.840.0172
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Kartel diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan kartel adalah perjanjian horizontal untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat merupakan suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji adalah bagaimana praktek kartel dalam penerapan *fuel surcharge* pada industri jasa penerbangan domestik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/PDT.SUS/2011 tentang Pembatalan Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2009 dengan Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktek kartel dalam penerapan *fuel surcharge* pada industri jasa penerbangan domestik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan untuk mengetahui Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/PDT.SUS/2011 tentang Pembatalan Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2009 apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Metode penelitian dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan. Sedangkan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kantor Perwakilan Daerah Medan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KPPU, terjadi pergerakan harga yang sama (*price parallelism*) pada sejumlah maskapai penerbangan, ketika harga *avtur* sudah turun namun pengenaan *fuel surcharge* masih berlanjut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/PDT.SUS/2011 tentang Pembatalan Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2009 telah sesuai dengan Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999.

Kata kunci : kartel, fuel surcharge, persaingan usaha

ABSTRACT

“CARTEL IN BUSINESS COMPETITION OF FLIGHT BY UU NO. 5 TAHUN 1999”

(Based On Putusan Mahkamah Agung No.613.K/PDT.Sus/2011)

FAUZI ABDULLAH

15.840.0172

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

The cartel is regulated in Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, which is a cartel is a horizontal agreement to influence prices by regulating the production and or marketing of goods and or services, which may result in monopolistic practices And or unfair business competition. Unfair business competition is a competition between business actors in carrying out production and or marketing activities of goods or services done in dishonest ways or by unlawful or inhibiting business competition. In this research, the problem studied is how the cartel practices in the application of fuel surcharge in the domestic aviation service industry according to Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, the conformity of the Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/PDT.SUS/2011 concerning Cancellation of KPPU Decision Number 25 / KPPU- I / 2009 with Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 regarding Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The purpose of this research is to know cartel practice in the application of fuel surcharge in domestic aviation service industry according to Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, and to know Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/PDT.SUS/2011 concerning Cancellation of KPPU Decision Number 25 / KPPU- I / 2009 is in accordance with Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

The research method is done by 2 (two) ways, library research and field research. Library research is still a theoretical research obtained through books, modules diktat-diktat, and general knowledge relevant to the title of the problem. Field research is a direct research conducted in practice in the field that is in Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Regional Representative Office in Medan).

The result of the research shows that based on KPPU examination result, there is a price parallelism in some airlines, when the price of aviation fuel has decreased but the fuel surcharge still continues. Putusan Mahkamah Agung Nomor 613 K/PDT.SUS/2011 concerning Cancellation of KPPU Decision Number 25 / KPPU-I / 2009 has been in accordance with the Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999.

Keywords : *cartel, fuel surcharge, business competition*